

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAN BEKAS  
(STUDI KASUS DI DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUH WARU  
KABUPATEN TEGAL).**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memporeleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)**



*Disusun Oleh:*

**Dwi Arief Setiawan**  
**132311019**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.Dwi Arief Setiawan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dwi Arief Setiawan

NIM : 132311019

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 4 Juli 2018

Pembimbing I,

H. Tolkah, MA.

NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II

Supangat M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Dwi Arief Setiawan  
NIM : 132311019  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal).

Telah dimunqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, pada tanggal :

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan dalam rangka menyelesaikan program Sarjana Satrata 1 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 26 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

H. Tolkah, M.A.

NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002



Penguji Utama II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.

NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Supanghi, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>1</sup>

(Qs. an-Nisa' : 29).

---

<sup>1</sup> Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*,  
Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H, hlm, 83.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk

### **1. Ayah dan Ibu (Bapak Muaman dan Ibu Khomisah)**

*“Sosok orang tua yang berbeda dengan orangtua lainnya bagi penulis, berkat kesabarannya, doa dan kerja keras yang telah dicurahkan demi sekedar melihat kami bahagia dan mampu memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Allah SWT memberi keberkahan di sepanjang usianya”.*

### **2. Kedua Kakakku (Agus Ulyono dan Atika Nur Ardiyanti)**

*“Kita saling melengkapi dan menyayangi dengan caranya sendiri-sendiri. Mari tetap bersinergi mewujudkan segala cita-cita bapak dan ibu. Semoga tetap dalam jalur yang benar dan mampu memberi senyum haru keada orang tua kita. Terimakasih atas keberadaan kalian, telah memacu penulis untuk senantiasa menjadi diri yang baik untuk jadi panutan”.*

### **3. Keluarga Besarku**

*“kalian telah memberi warna di hidupku. Terimakasih atas doa, dukungan dan senyuman. Perhatian dan nasehat yang senantiasa dikisahkan telah diberikan menjadikan penulis mengerti apa yang harus penulis lakukan”.*


## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juli 2018

Deklarator,



  
**Dwi Arief Setiawan**  
**132311019**

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan acuan untuk mengetahui maksud dari bentuk bahasa lain seperti bahasa arab, istilah bahasa arab, nama orang, judul buku, dan lain sebagainya yang pada asalnya ditulis menggunakan dialek lain menjadi tulisan bahasa Indonesia. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### 1. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = Sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = `	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### 2. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

### 3. Diftong

اي = ay

او = aw

4. Syaddah / Tasydid (ّ)

Tasydid dilambangkan dengan menggunakan huruf konsonan ganda, misal كسّر *kassara*.

5. Kata Sandang ( ال )

Kata sandang ( ال ) ditulis dengan *al*, misal العقل ditulis *al-`aql*. Ditulis dengan huruf kecil kecuali dipermulaan kalimat.



## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal. Dalam realitasnya jual beli ban bekas secara fisik objek jual beli tidak dapat diketahui dengan jelas, karena dalam pelaksanaannya penjual tidak memberi kejelasan mengenai keadaan ban bekas tersebut, padahal penjual tahu jika ban bekas yang sedikit cacat. Tetapi hal itu tidak akan diungkap apabila pembeli tidak menemukan sendiri, bahkan apabila ada cacat justru ditutupi sedemikian rupa sehingga cacat tidak terlihat. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam syarat objek jual beli, berarti jual beli ini salah satu syarat objeknya tidak terpenuhi. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktek jual beli ban di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal? 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal?.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian penjual dan pembeli ban bekas di Desa Kabunan. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli ban bekas yang diperoleh dari penjual dan pembeli berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data tambahan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dengan penjual dan pembeli, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mengandung unsur *Gharar*. Karena praktek jual beli yang dilakukan masih menyembunyikan kecacatan pada objek yang mengakibatkan kerugian terhadap pembeli. Selain menyembunyikan kualitas dari objek tersebut, penjual juga akan meraup untung yang sebesar-besarnya. Kemudian pada praktek jual beli ban bekas pembeli juga tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu dan penjual tidak menyebutkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas yang cacat, sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan tidak adanya garansi ketika ban bekas mengalami kecacatan. Praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal termasuk dalam jual beli *al-Ghasysyi* yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

**Kata Kunci:** hukum Islam, jual beli, ban bekas, *gharar*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak H. Tolkah, M.A selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Supangat M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muaman dan Ibu Khomisah serta kedua Kakaku Agus Ulyono, Atika Nur Ardiyanti dan seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
8. Seseorang yang menemani penulis dalam merangkai karya ini.
9. Bapak Chamdan, S.Pd.I selaku kepala Desa Kabunan, pejabat, staff, penjual dan pembeli yang ada di Desa Kabunan yang telah bersedia memberikan waktu sepenuhnya untuk melakukan wawancara mengenai skripsi ini, dengan sabar membantu dan mengarahkan ketika penelitian.
10. Senior IMT mas Ijul, mas Ojan, mas Hanif, mas Manda, mbak Mbul, mas Ari dll penulis selalu menaruh hormat pada kalian.
11. Kawan seperjuangan IMT yang selalu membuat saya tertawa lepas Bubi, Wildan, Haidar, Eva, Idza, Muhib, Naswa, Ani, Samsul, Subuh, Nisa, Yogi, Citra, dan masih banyak lagi, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, kalian memang teman-teman terkocak saya. Salam ngapak! Ora ngapak ora kepenak.
12. Kawan seperjuangan IKTASABA Wildan, Bubi, Haidar, Naswa, Nida, Ani, Eva, Muhib dan yang tak bisa saya sebut satu persatu. Kalian luar biasa.

13. Kawan seperjuangan kos Zubaidah Laila (ZL) yang kocak-kocak, Bubi, Haidar, Manda, Hasan, Sahal, Bambang, Gandhi, Samsul, Fahrur dan Mudi yang selalu membuat saya tertawa lepas.
14. Teman-Teman Satu Angkatan 2013 khususnya Jurusan MU A, dan keluarga Posko 33 KKN UIN Walisongo Desa Pilang Rejo Kec. Juwangi Kab. Boyolali.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah S.W.T. yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 9 Juli 2018

Penulis,

**Dwi Arief Setiawan**

**132311019**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xvi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisa Data.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM**

A. Pengertian Jual Beli .....	17
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
1. Rukun Jual Beli .....	27
2. Syarat Sah Jual Beli .....	33
D. Macam-macam Jual Beli .....	37
E. Khiyar dalam Jual Beli .....	43
F. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Gharar</i> .....	48
1. Macam-macam <i>Gharar</i> .....	48
2. Haramnya <i>Gharar</i> dalam Jual Beli .....	51
G. Konsep Dasar Hukum <i>Taklifi</i> dan <i>Wad'i</i> .....	51

## **BAB III PRAKTEK JUAL BELI BAN BEKAS DI DESA KABUNAN**

### **KECAMATAN DUKUH WARU KABUPATEN TEGAL**

A. Gambaran Umum Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal .....	59
1. Keadaan Geografis Desa Kabunan.....	59
2. Struktur Organisasi Desa Kabunan .....	60
3. Keadaan Penduduk Desa Kabunan .....	61
4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kabunan.....	61
5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kabunan.....	63
6. Pelayanan Pemerintahan Umum Desa Kabunan.....	63
7. Visi dan Misi Desa Kabunan.....	65
8. Prasarana dan Sarana Desa Kabunan .....	66
10. Progam Pembangunan Desa Kabunan .....	67
11. Arah kebijakan Desa Kabunan .....	70

B. Praktek Jual Beli Ban Bekas di Desa Kabunan Kecamatan	
Dukuh Waru Kabunan Kabupaten Tegal.....	70
1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Jual Beli Ban Bekas .....	70
2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Penjual Melakukan	
Jual Beli Ban Bekas .....	71
3. Praktek Jual Beli Ban Bekas Di Desa Kabunan .....	73

#### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPA PELAKSANAAN**

##### **JUAL BELI BAN BEKAS DI DESA KABUNAN**

A. Praktek Jual Beli Ban Bekas yang Terjadi di Desa Kabunan .....	82
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ban Bekas di	
Desa Kabunan .....	88

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
C. Penutup .....	102

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	62
Tabel 1.2.....	63
Tabel 1.3.....	64
Tabel 1.4.....	64
Tabel 1.5.....	67



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Berbicara masalah mua'amalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dalam dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 2

tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluluasaan kepada hamba – hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tak pernah pupus selama manusia masih hidup. Tak ada seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>3</sup> Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Darul Fath, 2004, Cet. Ke-1, hlm. 35

<sup>3</sup> Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. Hlm. 22

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Masalah mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisaa'/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَلْبَطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. an-Nisa : 29)

Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama. Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm, 23.

Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau muamalah lainnya.

Bahwa Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.<sup>5</sup> Disamping itu dalam muamalah yang berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.

Karena ajaran Islam memerintahkan secara *eksplisit* kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT, dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Penekanan pada salah satu dari keduanya akan merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan *eksistensi*-nya. keselamatan

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm, 27

menurut Islam, baik keselamatan dalam kehidupan dunia maupun akhirat, sangat ditentukan oleh prestasi seseorang berdasarkan sudut pandang dari kedua dimensi tersebut.<sup>6</sup> Prestasi seseorang dalam kehidupan dunia ini bisa diraih salah satunya dengan jual beli antara anggota masyarakat dengan cara yang adil dan jujur untuk memperoleh harta yang *halalan toyyiba*'.

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.<sup>7</sup>

Dalam melakukan jual beli yang penting diperhatikan ialah mencari yang halal dan dengan jalan yg halal pula. Artinya carilah barang yang halal yang diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai apa yang diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan- peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilarang oleh Allah SWT dan merupakan perbuatan yang batil.<sup>8</sup> Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar

---

<sup>6</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm, 21.

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015. hlm.17

<sup>8</sup> Syekh Abdurahman As-Sa'adi, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta : Senayan Publisng ,2008, hlm.138

*mudharat* nya apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melakukan ataupun melanggar larangannya, dikarenakan selain menimbulkan sebuah perpecahan di dalam umat Islam sendiri, serta dapat menimbulkan kebencian adanya kecurangan antara penjual dan pembeli.

Kemandirian perdagangan ban bekas yang berada di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal menjadi sektor perdagangan unggulan di daerah tersebut. Hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam laju perekonomian pada warga dan masyarakat sekitar. Mata pencaharian di Desa Kabunan selain perdagangan ban bekas masyarakat disana juga menjadi pengolah kerajinan bahan baku dari Ban bekas tersebut, seperti kerajinan tempat duduk dari karet ban, asbak , kampas rem, meja , sandal dan lain sebagainya. Sehingga banyak dikalangan masyarakat kota tegal dan daerah sekitar yang datang ingin membeli kerajinan yang terbuat dari ban bekas.

Kegiatan jual-beli yang lazimnya barang yang diperdagangkan adalah barang dalam kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor dan mobil di Tegal, kondisi penjualan ban bekas di Tegal menjadi sangat dinamis. Tingginya pemakaian sepeda motor dan mobil di Tegal memicu meningkatnya penjualan ban bekas. Jual beli ban bekas sangat menjamur dengan berbagai tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutama praktek jual beli ban bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan

kelancaran dalam usaha. Berbagai penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan pembeli untuk memiliki ban bekas yang murah.

Pada prakteknya yang terjadi pada jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal mempunyai kejanggalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Misalnya ketika kita ingin membeli ban bekas dengan perjanjian barang yang kita beli masih dalam kondisi dan kualitas yang baik tanpa ada kecacatan, tetapi dalam prakteknya kita sebagai pembeli tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu dan penjual tidak menyebutkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas yang cacat, sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan tidak adanya garansi ketika ban bekas yang mengalami cacat. Apalagi jika kita membeli dalam jumlah banyak, kemungkinan yang terjadi terdapat beberapa ban bekas yang mengalami kecacatan yang menyebabkan nilai, mutu dan harga berkurang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik jual beli yang dilakukan pedagang ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal berdasarkan perspektif Hukum Islam yang dikaji dalam skripsi yang berjudul: “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Ban Bekas ( Studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal )**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan oleh peneliti, adapun pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

### **2. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bagi peneliti**

Dapat dijadikan salah satu sarana peneliti untuk dapat mengetahui kepastian hukum Islam tentang praktek jual beli Ban Bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal



b. Bagi pelaku jual beli ban bekas

Penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan secara halal bisa dinikmati kedua pihak.

c. Bagi peneliti yang lain

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) yang akan melakukan penelitian yang akan datang yang berkaitan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya ilmiah permasalahan mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan, diberbagai literatur namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli Ban Bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Jurnal penelitian yang Berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo* . Hasil penelitian ini disusun oleh Moh.Ayatullah Al Ma'ruf (2016). Penelitian ini berisi praktek Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo jika barang yang diservis dalam jangka waktu 3 bulan tidak diambil maka barang akan dijual. Dari hasil penjualan barang servis cahaya elektro mendapatkan harga jual barang servis lebih tinggi dari pada harga jasa servis dan hasil penjualannya milik penuh toko cahaya elektro . Pelanggan sebagai pemilik barang tidak mendapatkan pembagian hasil penjualan barangnya. Padahal hasil penjualannya terdapat kelebihan terkait

dari harga jasa servis. Pemilik barang merasa dirugikan dan belum meridhai, seharusnya sisa dari penjualan barang tersebut itu hak dari pemilik barang dan toko berhak mendapatkan upah jasa servis.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ana Nuryani Latifah yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel (Studi kasus perjanjian jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)”, skripsi tersebut membahas tentang jual beli pesanan yang dilakukan dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi dan harga yang disepakati kedua belah pihak. Dalam jual beli mebel antara pengrajin Visa Jati dengan PT Hmfurniture pihak PT Hmfurniture tidak menyebutkan secara jelas tempo pembayaran dan harus ditangguhkan, hal ini terjadi pada pengrajin mebel sebagai penjual dan PT Hmfurniture sebagai pembeli.<sup>10</sup>

Karya ilmiah yang berjudul “*Sistem jual beli buah secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam ( studi kasus pasar pa’baeng- baeng Makasar)*” bahwa praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk. Akad yang

---

<sup>9</sup> Moh.Ayatullah Al Ma’ruf (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo*. Di akses pada tanggal 28 November 2017

<sup>10</sup> Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara*, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007, Di akses pada tanggal 28 November 2017

digunakan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon. Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan harga. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai dengan syara' jual beli dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur Gharar.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani yakni “Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)” penelitian ini mengkhususkan mengkaji dan menganalisa tentang jual beli barang rosok tanpa menggunakan alat ukur, yaitu hanya dengan menggunakan perkiraan dan tangan pembeli rosok untuk menentukan berat suatu barang. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur garar yang merugikan salah satu pihak.<sup>11</sup>

Skripsi karya Agus Muh. As. Ali Ismiyanto tentang praktek jual beli kacang tanah dengan sistem tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam. Dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur *Gharar* ditinjau dari segi objeknya dan juga akadnya. Adanya ketidakjelasan barang yang akan diperjualbelikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian diatas mengenai masalah jual beli itu berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki sudut pandang yang berbeda karena terkait dengan Jual

---

<sup>11</sup> Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*, Di akses pada tanggal 29 November 2017

<sup>12</sup> Agus Muh. As. Ali Ismiyanto, *Praktek Jual Beli kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di akses pada tanggal 29 November 2017

beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang mempunyai kejanggalan dalam barang yang dijualbelikan yang mengandung unsur kecacatan, sehingga akan merugikan si pembeli karena tidak ada kejelasan dan sifat terbuka bagi penjual ban bekas.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti meneliti praktek jual beli Ban Bekas Studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu mengumpulkan keterangan data dari para responden atau dari sumber utama yang dalam hal ini adalah pihak penjual dan pembeli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm.80.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data, pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapinya sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah, pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi pada fenomena yang terjadi di masyarakat tentang jual beli ban bekas. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di wilayah Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

a. Observasi

Merupakan suatu pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dengan maksud untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

b. Dokumentasi.

Suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa mengambil gambar dari proses jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

c. Wawancara.

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.<sup>15</sup> Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai jual beli ban bekas dengan unsur penipuan dikarenakan barangnya cacat yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam jual beli tersebut.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengelolaan data. Dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm, 274.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, hlm, 107.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 89.

peneliti menggunakan teknik analisis data *deskriptif*, yakni menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>17</sup> Karena jenis penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktek pelaksanaan jual beli ban bekas dan pandangan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

---

<sup>17</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 20.

BAB II : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jual beli menurut hukum Islam, di antaranya tentang jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

BAB III: Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan menjelaskan praktek jual beli Ban Bekas Studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

BAB IV: Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli Ban Bekas Studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (بَيْعٌ) secara bahasa merupakan masdar dari kata يَبِعُ - يَبِّعُ yang artinya Menjual. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut مُتَبِّعًا. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai’ adalah asy-syira’, al-mubadah dan at-tijarah.<sup>18</sup>

Pengertian jual beli (بَيْعٌ) secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Adapun pengertian jual beli menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>19</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan

---

<sup>18</sup> Syech Abdurahman as-Sa’adi dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm.143.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.67.

6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>20</sup>

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, yang dimaksud dengan *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *Al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.<sup>22</sup>

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Jual Beli” bahwa jual beli dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab antara lain :

1. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَالِكٍ  
عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: “jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan

<sup>20</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 143.

<sup>21</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm. 192

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar al-Fikr, 1983, hlm. 126

<sup>23</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.85

diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.<sup>24</sup>

2. Menurut ulama Hanafiah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”<sup>25</sup>

3. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*

مُقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تُمْلِكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

4. Menurut Ibu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*:

مُبَا دَلَةٌ ا لْمَالِ بِالْمَالِ تُمْلِكًا وَتُمْلَكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”<sup>26</sup>

Definisi Jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan” tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan “.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur’an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma’ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 176.

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.11.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 73-74.

menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>27</sup>

Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma ulama dan kaidah fiqih adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. an-Nisa' : 29).<sup>28</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *Gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang lain yang bisa dipersamakan dengan itu.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 22

<sup>28</sup> Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H, hlm, 83.

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 70.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *Gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat di atas juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah; 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۝  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>30</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli

<sup>30</sup> Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 107-108.

dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.<sup>31</sup> Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

---

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 71.

تَرَ تَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 59-60.

## 2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Hukum jual beli yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَا مَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ (اخره البخري)

Artinya:”Sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli mulamasah dan munabadzah”(HR. Bukhari).<sup>33</sup>

Hadis diatas menjelaskan tentang mengharamkan jual beli secara mulasamah, ialah membeli kain dengan hanya memegang saja, untuk mengetahui kasar halusnya, tanpa melihat kepada warna dan coraknya. Dan menjelaskan mengenai jual beli munabadzah ialah seorang penjual melempar kainnya kepada pembeli, sedang pembeli pun melempar kainnya kepada penjual. Dengan demikian terjadilah jual beli tanpa melihat barang dan memperhatikannya terlebih dahulu kemudian terjadi sengketaan yang sesudah mereka masing-masing memperhatikan barang-barangnya. Penjualan seperti ini tidak dibenarkan agama, karena didalamnya mengandung unsur penipuan.<sup>34</sup>

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Ialah Hadis Abi Sa'id yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه ترمذي)

<sup>33</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Jeddah : Darul Hadits Qahirah, 2014. hlm. 437.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadist*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm.180.



Artinya:”Dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu ‘Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)”.<sup>35</sup>

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shiddiqin*.

### 3. *Ijma’*

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>36</sup>

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 4. Kaidah fiqih

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>35</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 556.

<sup>36</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Depok: Gema Insani, 2007, hlm. 124.

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>37</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِيْتَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدٍ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”<sup>38</sup>

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi padaa waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

---

<sup>37</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 128.

<sup>38</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 52

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (ma'qud alaih), dan shighat (lafal):

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) Syarat yang berhubungan dengan aqidain yaitu:

- 1) Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.<sup>39</sup> Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَابْتَلُوا الَّتِي تَحْتَىٰ  
إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

<sup>39</sup> Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.35

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: 5. “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6. Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>40</sup>

- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi’iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah.
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah

<sup>40</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm, 100.

atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi jika tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud alaih* menurut para ulama antara lain:

- 1) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.<sup>41</sup>
- 2) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, muatiara di dalam lautan.
- 3) Milik penuh. Barang yang belum dimiliki secara penuh tidak boleh dijual.
- 4) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Tidak dibatasi waktu. Seperti Saya jual motor ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus ilzam (terlaksana) secara penuh.

---

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.77

- 6) Tidak digantungkan pada yang lain seperti "Saya jual motor ini jika ayahku pergi ke Mekkah". Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim tidak setuju dengan ketentuan ini.
- 7) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti kecoak, lalat, dan sejenisnya.
- 8) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan barang tersebut tidak menimbulkan kerusakan/kecacatan.

c. *Sighat* (akad ijab qabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah "menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad". Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah "pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad".

Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya "saya jual beli barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00" maka pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli "saya terima beli...." adalah qabul.

Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual apabila menerimanya dari pernyataan si pembeli itu adalah qabul.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>42</sup>

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata:  
 “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-.” Kemudian

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010, hlm.181

pembeli menjawab: “Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,- ”. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang khusus seperti kata-kata “saya jual” atau “saya dagangkan” (al-bai’ atau tijarah). Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.<sup>43</sup>

- 2) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya. Dari penjelasan diatas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa sighat (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. hal ini karena sighat termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan ulama terletak pada aqidain (penjual dan pembeli) dan mauqud ‘alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan aqidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah

---

<sup>43</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 22



dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan aqidain sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.

## 2. Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Ulama' berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Fiqih Muamalah" akad jual beli harus terhindar dari cacat (aib) yang meliputi enam macam yakni:

- a. Ketidakjelasan akad (*jahalah*). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm.79.

- b. Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan paksaan dari pihak lain yang bertransaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, dianiyaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Sehingga transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan.
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. Penipuan (*Gharar*). Yang dimaksud disini adalah Gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila Gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- e. Kemudharatan (*dharar*). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain)

tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

- f. Syarat syarat yang merusak jual beli, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti akad tabarru' (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat.

- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.<sup>45</sup>

Sebagaimana menurut Imam Mustofa yang dikutip dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah Kontemporer" mengenai syarat-syarat khusus jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi Gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda tetap menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
- b) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak.
- c) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli sharf (uang).
- d) Dipenuhinya syarat syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan).
- e) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- f) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan *modal salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.<sup>46</sup>

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi.

Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- 1. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.

<sup>45</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003, hlm.30

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 192-193.

2. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
3. Bebas dari Gharar
4. Bebas dari riba
5. Bebas dari cacat

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama hanafiah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>47</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Jual beli" dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi empat macam yaitu <sup>48</sup>:

1. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
2. *Bai' as-Salam atau salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
3. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan uang atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini syarat sebagai berikut: 1) saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak; 2) sama

---

<sup>47</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm.29

<sup>48</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.48.

jenisnya barang yang dipertukarkan; 3) tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya; 4) penyerahan barangnya tidak ditunda.

4. *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.

Ditinjau dari segi batasan dan nilai tukar barang yang dikemukakan oleh pendapat Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Jual beli” bahwa jual-beli dibagi tiga macam yaitu :

1. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
2. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
3. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' al- Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata: “Saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000.” jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.
  - a. *Bai' al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah harga keuntungan yang disepakati. Dengan kata

lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

- b. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
- c. *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).<sup>49</sup>

Ditinjau dari segi Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yang dikemukakan oleh pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Muamalah” bahwa jual-beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanam yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mulammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikoli sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

---

<sup>49</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. . . hlm. 50

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
11. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikan tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).<sup>50</sup>

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.

---

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.78-81.



- c. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.

Sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Jual beli” dilihat dari segi Jual beli yang dilarang karena memudaratkan dan mengandung penipuan yaitu : <sup>51</sup>

1. *Bai’ al-Rajul ‘ala Bai’ Akhihi* yaitu jual beli seseorang diatas jual beli saudaranya. Misalnya menawar atas tawaran saudaranya: seorang menawar dengan harga yang lebih tinggi barang yang ditawarkan oleh orang lain, dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat dalam masalah harga.
2. *Bai’ al-Najasy* (menyembunyikan) yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Misalnya seseorang bersekongkol dengan penjual untuk meninggikan harga barang dagangannya, padahal ia sama sekali tidak ingin membelinya. Akan tetapi bertujuan agar pembeli tertipu, sehingga menyebabkan dia mau membeli barang tersebut dengan harga tinggi.
3. *Bai’ Talaqq al-Jalb au al-Rukban* yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang dipinggir

---

<sup>51</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.127.

kota (diluar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga dipasar. Mereka mengatakan kepada pedagang bahwa harga sedang jatuh, pasar sedang sepi. Tindakan mereka itu mengakibatkan pedagang tertipu. Sementara tindakan mereka seperti itu dilarang karena dapat mengakibatkan kemudharatan kepada pihak pedagang.

4. *Bai' al-Hadir li al-Bad* yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung) terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Dia (agen) menjual komoditi lebih mahal daripada harga pada saat itu. Dan dia dapat komisi dari penjual (petani) dan pembeli (baik pedagang maupun konsumen) dikota.
5. *Bai' Fadhl al-Mai* yaitu jual beli air yang lebih dari pada keperluan. Misalnya seseorang yang mempunyai sumur yang didalamnya terdapat kelebihan dari kebutuhannya. Kebetulan didalamnya juga terdapat rerumputan. Pemilik ternak membutuhkan air sumur tersebut untuk keperluan pemeliharaannya. Maka diharamkan kepada seseorang melarannya untuk mengambil air dan rerumputan tersebut, dan diharuskan memberikanya tanpa imbalan apapun, karena apabila dilarang akan menyebabkan hewan ternaknya kehausan. Oleh karena itu melarang orang lain mengambil air yang lebih (dari kebutuhan) menyebabkan kemudharatan dari tanaman, keturunan, dan hewan ternak lainnya.
6. *Bai' al-Muhtakir* yaitu jual beli penimbun barang komoditi (barang yang dapat diperjual belikan).

7. *Bai' al-Ghasysyi* yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.

Menurut jumhur ulama, makna *al-Ghasysyi* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Praktek *Bai' al-Ghasysyi* bisa berbentuk perbuatan, ucapan dan menyembunyikan cacat pada barang. Contoh bentuk perbuatan, seperti mengikat pentil susu hewan agar tampak banyak isinya. Contoh bentuk ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan. Contoh bentuk menyembunyikan cacat pada barang, seperti menjual kain yang sobek, yang tidak diketahui pembeli.

8. *Bai' al-Taljiah* yaitu pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang dzalim.

#### **E. *Khiyar* dalam Jual Beli**

Secara lughah (bahasa), *khiyar* berarti; memilih, menyisihkan atau menyaring. Secara semantik kebahasaan, kata *khiyar* berasal dari kata *khair* yang berarti baik. Dengan demikian *khiyar* dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Menurut istilah *Khiyar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal. Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyar* adalah “suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau

membatalkannya) jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *rukayah*, atau hendaknya memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yyin*".<sup>52</sup>

*Khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *Khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*.

1. *Khiyar majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama masih berada di majelis akad. Walaupun akad telah sah dengan adanya ijab dan qabul, selama keduanya masih berada dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan akad jual beli itu.

---

<sup>52</sup> Sohari sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 76.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui keabsahan *khiyar* majelis. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika ijab dan qabul sudah dilakukan dan tidak ada *khiyar* bagi keduanya. *Khiyar* menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian. Akad jual beli termasuk akad *mua'adhadh* dan bersifat lazim seperti halnya akad nikah. Dengan demikian menurut kedua imam tersebut, akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaan dengan mengucapkan ijab dan qabul.<sup>53</sup>

2. *Khiyar syarat*, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”. Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.

Menurut Hanafiyah dan syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Karena menurut mereka waktu tiga hari itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian jika melewati tiga hari, jual – beli tersebut batal. Akad tersebut akan tetap menjadi shahih jika tidak melewati batas tiga hari, akan tetapi jika melewati tiga hari maka akadnya menjadi tidak syah. Sedangkan Abu Yusuf, Imam Malik, dan

---

<sup>53</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 34.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatasi hanya tiga hari, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan disyariatkannya *khiyar* tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, musyawarah terlebih dahulu, dan terhindar dari tipuan.<sup>54</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :”Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S.Al-Maidah:1)<sup>55</sup>

Berkenaan dengan masa berakhirnya *khiyar syarat*, para ulama mengemukakan hal sebagai berikut:

- a. Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tanpa adanya pernyataan apakah mau diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan keadaan demikian, jual beli hukumnya menjadi sempurna atau sah.
- c. Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.

<sup>54</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 37.

<sup>55</sup> Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm. 87.

- d. Terdapat pertambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli, dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyar* menjadi batal.
  - e. Meninggalnya pemilik *khiyar*.
3. *Khiyar aib*, artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* menurut ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut :

- a. Cacat pada barang itu diketahui sebelum serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau masih baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima itu masih dalam tanggungan penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawab penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang diketahui setelah terjadinya serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak *khiyar*, karena dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawab pembeli.

- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar*.
- c. Cacat itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan bersusah payah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

#### **F. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar***

*Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.<sup>56</sup> Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>57</sup>

Jual beli *Gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.<sup>58</sup>

Sistem jual beli *Gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

---

<sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 97.

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147.

<sup>58</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 138.



Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui".<sup>59</sup>

*Gharar* merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhla- akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli *Gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam.

#### 1. Macam-macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai *Gharar* maka *Gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *Gharar* sighat aqad dan *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

##### a. *Gharar* dalam sighat aqad

*Gharar* pada sighat yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *Gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan aqad. Unsur *Gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 23.

yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *Gharar* sighat dibagi menjadi:

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli
- 2) Jual beli urban
- 3) Jual beli munabazah
- 4) Jual beli hasah
- 5) Jual beli mulamasah
- 6) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.<sup>60</sup>

b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

*Gharar* bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *Gharar*.

*Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya ada empat:

- 1) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- 2) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- 3) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- 4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- 5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- 6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksi
- 8) Transaksi pada benda yang tidak ada
- 9) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang: Toha Putra 2011, hlm. 111.

<sup>61</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, hlm.158

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam Gharar ada dua yaitu Gharar dalam sighat aqad dan Gharar pada benda yang berlaku pada aqadnya.

## 2. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *Gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat atau kualitas barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- i. Termasuk dalam transaksi *Gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).
- j. Jual beli Munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempari bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, macam-macam

*Gharar* yang dilarang itu ada sepuluh, di antaranya ialah tidak diketahuinya sifat atau kualitas suatu barang tersebut.

## G. Konsep Dasar Hukum *Taklifi* dan *Wad'i*

### 1. Pengertian Hukum

Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan hukum sebagai berikut: “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan

berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakulatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang”. Kemudian, yang dimaksud Khitob Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur’an, al-Sunnah maupun yang lainnya. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya al-Qur’an dan al-Sunnah. Adapun *ijmā’* dan *qiyās* hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Qur’an dan al-Sunah tersebut. Yang di maksud perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakalsehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan, seperti *ghibah* (mengunjing) dan *namimah* (mengadu-domba).<sup>62</sup>

## 2. Pembagian Hukum

Bertitiktolak dari latarbelakang hukum di atas, maka hukum menurut ulama usul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *Taklifi* dan *Wad’i*.

### a. Pengertian Hukum *Taklifi* (Pembebanan)

Hukum *Taklifi* ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Semisal, hukum shalat, membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan contoh yang bersifat memilih (fakultatif) adalah makan dan

---

<sup>62</sup>Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-IV, 2010, hlm. 295.

minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.<sup>63</sup>

Terkait bentuk-bentuk hukum *Taklifi* terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum *Taklifi*. Pertama, bentuk-bentuk hukum *Taklifi* menurut jumhur ulama *Usul Fikih* atau *Mutakalimin*. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu *ijab*, *nadb*, *ibāhah*, *karahan* (makruh), dan *tahrīm*. Kedua, bentuk-bentuk hukum *Taklifi* seperti *iftirad*, *ijab*, *nabd*, *ibahah*, *karahah tanzhiliyah*, *karahah tahrimiyyah*, dan *tahrim*.

#### 1) Ijab atau Wajib

Ijab adalah suatu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Sesuatu yang wajib tersebut pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan adzab.<sup>64</sup>

#### 2) Nadb atau Sunnah

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman<sup>65</sup>. Suatu yang nadb itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak

---

<sup>63</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 297.

<sup>64</sup>Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul* Penj. Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007), hlm. 8.

<sup>65</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 298.

mendapatkan adzab. Nadb memiliki nama lain yaitu sunnah, mustahab, dan nafl.<sup>66</sup>

### 3) *Ibahah* atau Mubah

*Khithab* Allah yang bersifat fakultatif mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari *khithab* Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*. Kata mubah memiliki nama lain halal dan jaiz. Mubah atau *Ibahah* senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.<sup>67</sup>

### 4) Karahah

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan tidak dikenai hukuman. Karahah atau makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan adzab.<sup>68</sup>

### 5) Tahrim

Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut *hurmah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan adzab.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, hlm. 9.

<sup>67</sup>Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, hlm. 11.

<sup>68</sup>Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, hlm.10.

<sup>69</sup>Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, hlm. 9.

Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan *khithab tasyri'*, seperti wajib, haram, makruh, sunah dan mandub.<sup>70</sup>

b. Hukum *Wad'i*

1. Pengertian Hukum *wad'i*

Hukum *wad'i* adalah firman Allah Swt yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum Taklifi, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum *wad'i*. Didalam ilmu hukum disebut pertimbangan hukum.

Macam-Macam Hukum *wad'i* yaitu sebagai berikut :

a. Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syar'i sebagai tanda adanya hukum.

b. Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum-pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara. Oleh sebab itu, suatu hukum Taklifi tidak dapat diterapkan kecuali bila telah

---

<sup>70</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 302.

memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'. Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.<sup>71</sup>

c. *Man'i* (Penghalang)

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris mewaris). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewaris ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut.<sup>72</sup>

d. *Sihah*

Hukum yang sesuai dengan tuntutan syara'. Yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada *man'i*. Misalnya, mengerjakan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh

---

<sup>71</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 314.

<sup>72</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 314.



sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun *man'i* nya tidak ada.<sup>73</sup>

e. Batal ( Tidak Sah)

Terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-belikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'.

f. 'Azimah dan Rukhsah

'Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh *mukallaf* wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat shalat dzuhur adalah empat rakaat. Jumlah raka'at ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah empat rakaat disebut dengan 'azimah. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut *rukhsah*. Para ahli

---

<sup>73</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 315.

UshulFiqh mendefinisikan *rukhsah* dengan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada udzhur.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 316.

### **BAB III**

## **PRAKTEK JUAL BELI BAN BEKAS DI DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUH WARU KABUPATEN TEGAL**

### **A. Gambaran Umum Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal**

#### **1. Keadaan Geografis Desa Kabunan**

Desa Kabunan berada pada koordinat 109.09975 BT dan - 6.991983 LS. Desa Kabunan memiliki luas 172.66 Hektar dan berada dalam ketinggian 15 Meter diatas permukaan laut. Kabunan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Dukuh Waru, Kabupaten Tegal. Kecamatan Dukuh Waru memiliki 10 Desa yaitu: Blubuk, Buluk Pacing, Dukuh Waru, Gumayun, Kabunan, Kalisoka, Pedagangan, Selapura, Sindang, Slarang Lor.<sup>75</sup>

Batas-batas wilayah Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal meliputi:

- a. Sebelah Utara : Pedagangan Kecamatan Adiwerna.
- b. Sebelah Selatan : Tegalandong Kecamatan Lebaksiu.
- c. Sebelah Timur : Kalisapu Kecamatan Slawi.
- d. Sebelah Barat : Gumayun Kecamatan Jatibarang Brebes .

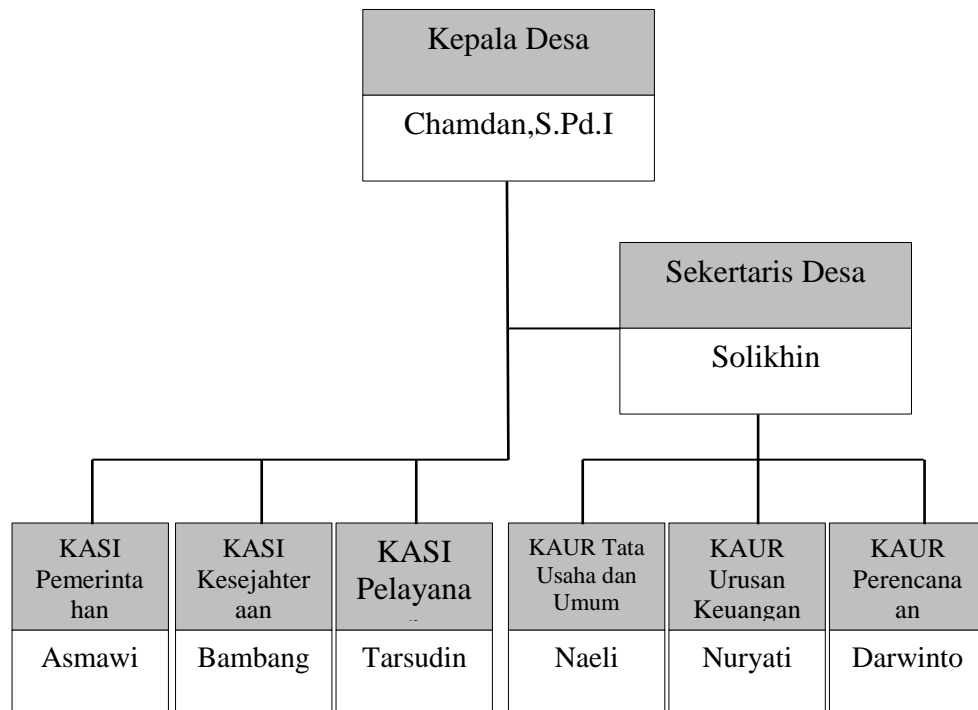
---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Chamdan selaku Kepala Desa Tegalharjo pada tanggal 1 mei 2018

## 2. Struktur Organisasi Desa Kabunan

Susunan struktur organisasi Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru

Kabupaten Tegal tahun 2018 :



*Sumber : Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.*

Keterangan dari Struktur Organisasi Desa Kabunan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Chamdan, S.Pd.I
- b. Sekretaris Desa : Solikhin
- c. KASI Pemerintahan : Asnawi
- d. KASI Kesejahteraan : Bambang
- e. KASI Pelayanan : Tarsudin
- f. KAUR Tata Usaha dan Umum : Naeli Ianati
- g. KAUR Urusan Keuangan : Nuryati

h. KAUR Perencanaan : Darwinto

### 3. Keadaan Penduduk Desa Kabunan

Desa Kabunan memiliki jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 7 dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 35. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1701 KK dengan jumlah penduduk Desa Tegalharjo secara keseluruhan adalah 6.831 orang dimana penduduk laki-laki berjumlah 3.439 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.392 orang. Berikut ini adalah tabel rinciannya:

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Penduduk Desa Kabunan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Laki-Laki	3.439 Jiwa	50,35 %
2	Jumlah Perempuan	3.392 Jiwa	49,65 %
	Total Keseluruhan	6.831 Jiwa	100 %

*Sumber : Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.*

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk jenis kelamin Laki-Laki lebih banyak dari jumlah penduduk Perempuan dengan selisih 47 Jiwa.

### 4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kabunan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga,

penduduk Desa Kabunan juga bervariasi dalam pekerjaannya. Data jenis pekerjaan penduduk Desa Tegalharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

## Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Kabunan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	845 Jiwa	29,65 %
2	Wiraswasta	561 Jiwa	19,69 %
3	Buruh Harian Lepas	741 Jiwa	26,00 %
4	Karyawan Swata	445 Jiwa	15,61 %
5	TNI/POLRI	40 Jiwa	1,40 %
6	PNS	95 Jiwa	3,33 %
7	Lain-Lain	122 Jiwa	4,28 %
	Total	2.849 Jiwa	100 %

*Sumber : Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.*

Data diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kabunan bermacam-macam yaitu : Petani, wiraswasta, buruh harian lepas, karyawan swasta, TNI/POLRI, PNS dan lain-lain. Sumber mata pencaharian penduduk Desa Kabunan lebih banyak sebagai petani dengan jumlah 845 jiwa dengan prosentase 29,65 %.

## 5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kabunan

Tabel 1.3

Daftar Sarana Peribadatan Desa Tegalharjo

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	6.793	99,44 %
2	Kristen	-	0 %
3	Protestan	2	0,02 %
4	Katolik	36	0,52 %
5	Hindu	-	0 %
6	Budha	-	0 %
	Total	6831	100 %

Sumber : Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Kehidupan masyarakat Desa Kabunan bisa dikatakan dalam peribadatan atau dalam sisi keagamaannya masyarakat sangat agamis karena dalam catatan yang diperoleh masyarakat desa rata-rata memeluk agama Islam dengan jumlah 6.793 jiwa dengan prosentase 99,44 % .

## 6. Pelayanan Pemerintahan Umum Desa Kabunan

Tabel 1.4

Pelayanan Pemerintahan Umum

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Pelayanan Penduduk	Ada	-	-

2.	Pemakaman	Ada	-	2 lokasi
3.	Perijinan	Ada	-	-
4.	Pasar Tradisonal	-	Tidak ada	-
5.	Ketentraman	Ada	-	-

*Sumber : Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja dan apabila diperlukan warga, 24 jam setiap perangkat juga melayani warganya bila diperlukan.
2. Ada dua lokasi pemakaman dipimpin oleh kasi pelayanan dan ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes. Ijin ini selain ke pemerintah desa juga diteruskan ke muspika. Sedangkan ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
4. Pasar tradisonal tidak ada, warga bisa datang ke pasar tradisonal yang ada di Slawi ataupun Jatibarang.
5. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 31 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil.



Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari polsek dan koramil.<sup>76</sup>

## **7. Visi dan Misi Desa Kabunan**

### **a. Visi Desa**

1. Kabunan dan berhikmah secara menyeluruh

### **b. Misi Desa**

1. Menciptakan sebuah pemerintah Desa Kabunan yang bermartabat fan berwibawa, dengan meningkatkan kemampuan moral, etika kerja secara akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengelola pembangunan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penggunaan keuangan anggaran ADD,DD dan lainnya untuk pelaksanaan pembangunan desa secara transparan.
3. Meningkatkan pendidikan dasar agama demi tertanamnya moral yang baik serta mental yang tangguh bagi generasi muda.
4. Merencanakan/mengupayakan untuk pendayagunaan irigasi untuk meningkatkan pertanian secara maksimal.
5. Menciptakan suasana yang kondusif untuk warga masyarakat secara keseluruhan.
6. Meningkatkan kerjasama untuk investasi dengan instansi yang ada.
7. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang mengatasi perbedaan golongan dan budaya.

---

<sup>76</sup> Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

## 8. Prasarana dan Sarana Desa Kabunan

Tabel 1.5

### Prasarana dan Sarana Desa

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Balai Desa	1	Baik
2.	Gedung SLTA	-	Baik
3.	Gedung SLTP	2	Baik
4.	Gedung SD	1	Baik
5.	Gedung MI	1	Baik
6.	Gedung TK	2	Baik
7.	Masjid	4	Baik
8.	Musholla	13	Baik
9.	Gereja	-	Baik
10.	Polindes	1	Baik
11.	Kantor PKK	1	Baik
12.	Poskampling	3	Baik
13.	Jembatan	7	Baik

14.	Gedung TPQ	2	Baik
-----	------------	---	------

*Sumber : Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kondisi jalan penghubung dari Desa Kabunan ke Kecamatan, Kabupaten dan ibu kota provinsi serta desa sekitarnya sudah baik yaitu berupa jalan cor dan hotmix, serta mempunyai akses jembatan yang baik di setiap aliran sungai.
- b. Sarana kesehatan di Desa Kabunan tergolong mudah. Tercatat ada bidan desa dan polindes, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kabunan.
- c. Sarana pendidikan di Desa Kabunan saat ini cukup memadai. Tercatat ada beberapa lembaga pendidikan mulai dari TK, TPQ, SD, MI, SLTP yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kabunan.
- d. Sarana ibadah di Desa Kabunan pada umumnya memeluk agama Islam, Tercatat ada 4 Masjid dan 13 Mushola dengan kondisi baik.

## **9. Progam Pembangunan Desa Kabunan**

### **a. Bidang infrastruktur**

Progam pembangunan infrastruktur termasuk progam pembangunan yang mendesak dilakukan di Desa Kabunan beberapa infrastruktur yang mendapat prioritas pembangunan diantaranya:

1) Pengaspalan jalan

Pengaspalan jalan dimaksud adalah untuk meneruskan pengaspalan jalan desa yang belum tersentuh pengaspalan sedangkan lokasinya dan kondisinya jalan sudah bisa diaspal.

2) Pembangunan saluran air

Pembangunan saluran air berfungsi untuk saluran pembuangan limbah rumah tangga dan air hujan, masih banyak lokasi yang perlu dibangun baru dan rehab.

3) Pembangunan talud jalan

Pembangunan talud jalan jalan perlu dibuatkan talud, sedangkan saat ini masih banyak jalan yang tidak memiliki talud.

4) Pembangunan pavingisasi

Pembangunan pavingisasi sebagai sarana mobilitas masyarakat untuk mengakses wilayah yang masuk dari jalan, saat ini masih ada jalan gang yang belum dipaving dan ada juga kondisi paving yang sudah rusak karena sudah lama dibangun.

5) Pembangunan rehab rumah tidak layak pakai dan MCK

Pembangunan rehab rumah sangat diperlukan sebagai perhatian pemerintah desa kepada warga tidak mampu yang masih memiliki rumah tidak layak pakai dan belum punya MCK.

#### 6) Pembangunan jembatan

Pembangunan sarana jembatan sangat diperlukan sebagai akses warga salah satunya menuju areal persawahan di Desa Kabunan.

#### b. Bidang Pendidikan

Program pembangunan dalam bidang pendidikan di pandang perlu untuk memberikan beasiswa atau pelatihan/ketrampilan kepada siswa berprestasi atau tidak mampu.

#### c. Bidang Kesehatan

Program pembangunan dalam bidang kesehatan dianggap perlu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Desa Kabunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan gizi ibu hamil.
- 2) Pemberian gizi anak dengan resiko gizi buruk.
- 3) Meningkatkan kesehatan lansia.
- 4) Pengobatan penyakit menular/menahun.

#### d. Bidang Ekonomi

Pembangunan dalam bidang ekonomi sangat diperlukan bagi masyarakat di Desa Kabunan, contohnya :

- 1) Menurunkan jumlah pengangguran dengan mengadakan kursus/ketrampilan diharapkan mampu menjadi bekal dalam mencari pekerjaan.

- 2) Meningkatkan pendapatan warga dengan memberikan pinjaman modal.<sup>77</sup>

## **10. Arah Kebijakan Desa Kabunan**

Arah Kebijakan Desa Kabunan dibagi menjadi tiga agenda besar, yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya potensi desa dalam mewujudkan visi Desa Kabunan.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang klaster industri kerajinan ban dan untuk mewujudkan Desa Kabunan.
- c. Manajemen dan tata kelola antar kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan pendukung untuk mewujudkan Desa Kabunan.<sup>78</sup>

## **B. Praktek Jual Beli Ban Bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal**

### **1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Jual Beli Ban Bekas**

#### **a. Pihak Penjual**

Penjual ban bekas merupakan orang yang menyediakan barang dagangannya yaitu ban bekas untuk didistribusikan kepada beberapa pembeli dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Selain menjual ban bekas, penduduk Desa Kabunan juga banyak yang memanfaatkan ban bekas menjadi salah satu kerajinan yang berasal dari ban bekas, misalnya membuat kursi, meja, asbak,

---

<sup>77</sup> Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Kabunan Tahun 2016

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Solikhin selaku Sekertaris Desa Tegalharjo pada tanggal 1 mei 2018

tempat sampah, yang berasal dari ban bekas. Masyarakat Desa Kabunan menjual ban bekas di sekitar Desa Kabunan sendiri. Sebagian penduduk ada yang berjualan diluar Desa kabunan. Apalagi sejak lama dari tahun 80-an sampai sekarang sudah banyak yang memakai kendaraan sebagai transportasinya untuk kegiatan sehari-harinya, sehingga menjual ban bekas adalah salah satu peluang bagi Desa Kabunan untuk membantu perekonomiannya. Menurut penjual dalam hal ini merupakan kunci dalam jual beli ban bekas, karena yang mengatur jumlah barang dan mengetahui kualitas barang hanyalah penjual.<sup>79</sup>

b. Pihak Pembeli

Pembeli merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pembelian ban bekas. Pembeli disini biasanya melakukan beberapa proses transaksi jual beli dengan sistem pembelian di tempat langsung yaitu di Desa Kabunan.<sup>80</sup>

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Penjual Melakukan Jual Beli Ban Bekas

a. Pihak penjual.

- 1) Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli ban bekas yang dekat dan banyak beragam ukuran ban bekas yang dibutuhkan .

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Safik selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 2 mei 2018

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Nur selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 2 mei 2018

- 2) Kebutuhan masyarakat akan ban bekas yang terbilang murah.
- 3) Penjual bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar dibanding menjual ban baru.
- 4) Proses bisnis yang sangat menjanjikan dan akan selalu berkembang bersama dengan pertumbuhan ekonomi.
- 5) Melihat keberadaan penjual ban bekas yang sudah berdiri sebelumnya semakin berkembang.
- 6) Adanya link dan jaringan antar penjual ban bekas, sehingga mempermudah adanya timbal balik penjual dan apabila kekurangan maka mengambil dari penjual yang lain.
- 7) Permodalan pembelian ban bekas lebih sedikit di bandingkan ban baru dan bisa membeli banyak macam-macam ukuran ban yang di butuhkan pembeli, sehingga bisa menghemat keuangan.<sup>81</sup>

b. Pihak pembeli

- 1) Pembeli bisa lebih menghemat biaya dengan adanya tempat jual beli ban bekas yang dekat.
- 2) Dalam bertransaksi menjadi lebih mudah karena di Desa Kabunan terdapat penjual ban bekas yang bermacam-macam, sehingga pembeli bisa lebih mudah mencari ban bekas yang di inginkan.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Suseno selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018



- 3) Harganya terjangkau dibanding ban baru.
- 4) Pembeli tidak mengalami kesulitan apabila akan membeli ban bekas yang sudah tidak terpakai oleh masyarakat.<sup>82</sup>

### 3. Praktek Jual Beli Ban Bekas Di Desa Kabunan

Kegiatan jual-beli yang lazimnya barang yang diperdagangkan adalah barang dalam kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor dan mobil di Tegal, kondisi penjualan ban bekas di Tegal menjadi sangat dinamis. Tingginya pemakaian sepeda motor dan mobil di Tegal memicu meningkatnya penjualan ban bekas. Jual beli ban bekas sangat menjamur dengan berbagai tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutama praktek jual beli ban bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran dalam usaha. Berbagai penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan pembeli untuk memiliki ban bekas yang murah.

Bapak Fajar seorang penjual ban bekas mengatakan bahwa jual beli ban bekas adalah salah satu penjualan ban bekas yang sangat mudah dalam bertransaksi. Dalam prakteknya, pembeli dapat membeli secara *cash* sesuai dengan kesepakatan. Apabila pembeli atau masyarakat yang akan menjual ban bekas lagi ke sesama penjual ban bekas, maka di Desa Kabunan merupakan pilihan yang tepat karena

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018

banyak beragam ban bekas yang bisa kita pilih sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak hanya warga Desa Kabunan saja yang bertransaksi jual beli ban bekas yang berada di Desa Kabunan, tapi banyak masyarakat atau konsumen diluar Desa Kabunan baik menjual ataupun membeli ban bekas. Harapan dari pembeli dapat memperoleh ban bekas yang diinginkan dengan harga yang relatif murah dibandingkan membeli ban bekas baru.<sup>83</sup>

Transaksi jual beli ban bekas di Desa Kabunan tidak selalu diimbangi dengan kejujuran dan sifat keterbukaan, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan pembeli. Hal ini juga terjadi pada penjual ban bekas di Desa Kabunan yang penulis teliti. Pada prakteknya yang terjadi tidak semua benar menurut peraturan dan hukum agama. Kebanyakan konsumen datang untuk membeli ban bekas seperti ban bekas motor dan mobil, penjual tidak memberikan secara rinci dan jelas mengenai keadaan bekas tersebut. Padahal penjual mengerti jika ban bekas akan dibeli adanya cacat, tetapi hal itu tidak akan diberitahukan kepada pembeli, dimana penjual akan menutup-nutupi kecacatannya. Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama harus diberitahukan kepada pembeli justru dihilangkan atau disembunyikan. Sedangkan menurut pendapat Bapak Untung selaku penjual ban bekas hal itu merupakan hal yang biasa dan wajar, bukan merupakan pelanggaran dan bukan dianggap penipuan karena kalau

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018

tidak menyembunyikan cacat maka ban bekas yang dijual tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>84</sup> Berbeda dengan pendapat Bapak Yanto, selaku pembeli ban bekas mengatakan banyak para pembeli yang mengalami kekecewaan dan merasa dirugikan setelah membeli ban bekas dikarenakan ban bekas yang dibeli mengalami cacat dan tidak bisa digaransikan.<sup>85</sup>

Transaksi jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal melalui beberapa proses yaitu :

a. Cara memperoleh ban bekas

Ban bekas yang hendak diperjualbelikan berasal dari beberapa kota besar, seperti dari Kota Cirebon, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Sistem yang dilakukan dalam jual beli ban bekas tersebut menggunakan sistem borongan, atau penjualan dalam jumlah banyak. Hal ini yang akan menimbulkan banyaknya kecacatan pada kualitas yang ada pada ban bekas. Secara umum ban yang didapatkan tidak semuanya dengan kondisi yang cacat, namun juga masih ada beberapa ban bekas yang memiliki kualitas yang baik atau masih bisa dipakai.

Misalnya semacam ban *tubless* juga banyak ban yang tidak bisa dibuat *tubless* dengan kondisi cacat, sehingga penjual ban

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Untung selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 Mei 2018

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 Mei 2018

bekas yang cacat di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal menjual ke masyarakat dan pembeli itu dengan menutupi kecacatannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan bisa juga mendapat ban bekas dengan tukar tambah ban dengan para konsumen dan penjual ban bekas yang lain.<sup>86</sup>

b. Cara Melaksanakan Perjanjian

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mardi selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan. Beliau menerangkan bahwa praktek transaksi jual beli ban bekas ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual menyatakan, “*saya jual ban bekas tersebut,*” dan pembeli menjawab, “*saya beli ban bekas tersebut dari anda*”. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.<sup>87</sup>

Bapak Lutfi selaku pembeli ban bekas mengatakan bahwa pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri ban bekas yang ingin dibeli. Setelah pembeli selesai memilih ban bekas tersebut kemudian pembeli melakukan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Ais selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 4 mei 2018

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Mardi selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018

pembayaran. Menurutnya pembeli akan merasa kecewa atau merasa dirugikan pada saat mengetahui bahwa kualitas ban bekas tersebut sangat tidak memuaskan dari perkiraan karena adanya cacat. Karena sebelumnya tidak ada kejelasan tentang kualitas dari ban bekas tersebut karena penjual tidak memberitahu secara langsung cacatnya dan pembeli tidak ada kesempatan untuk mencoba ban bekas yang dibeli pada saat transaksi, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada transparansi barang, yang dimaksud dengan transparansi barang yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Jika dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak tercapai unsur suka sama suka atau saling rela karena tidak adanya transparansi barang, maka dapat berakibat pada batalnya akad karena tidak tercapai unsur kerelaan dan juga mengandung unsur penyamaran.<sup>88</sup>

c. Cara Menetapkan Harga

Penetapan harga penjualan ban bekas di Desa Kabunan bermacam-macam tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penetapan harga penjualan ban bekas mobil mencapai Rp.150.000 - Rp.250.000, berbeda dengan harga ban bekas motor mencapai harga Rp.20.000 - Rp.50.000. Ketika terjadi transaksi penjual mengajukan kepada pembeli dengan harga ban bekas yang

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Lutfi selaku pembeli ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018

dibutuhkan. Setelah kedua belah pihak setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.<sup>89</sup>

Hasil wawancara dengan penjual dan pembeli mengenai praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan. Maka peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli ban bekas dan objek jual beli sebagai berikut :

1) Ijab qabul dalam jual beli ban bekas.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada jual beli ban bekas, tidak jauh berbeda dengan jual beli ban bekas yang lain. Pembeli yang datang akan memilih sendiri ban bekas yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi ban bekas tersebut maka penjual akan mengatakan pada konsumen ban bekas yang dijual masih dalam kualitasnya baik. Jika ban bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya. Tetapi pada dasarnya ban bekas yang dijual ada cacatnya, biasanya harganya relative lebih murah dibanding dengan ban bekas yang kondisinya masih bagus atau tidak ada cacat dari situlah masyarakat yang menginginkan ban bekas berdatangan karna harganya relatif murah dan terjangkau.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Kholis selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 4 mei 2018

Transaksi jual beli ban bekas dilaksanakan secara lisan, baik mengenai harga. Bentuk kata-kata yang digunakan dalam negosiasi sangat jelas mengenai harga tetapi dalam memberikan kejelasan kualitas ban bekas penjual tidak selalu terbuka dan tidak ada garansi ketika terjadi kecacatan. Sehingga pembeli banyak yang mengalami kerugian. Misalnya transaksi jual beli ban bekas antara Bapak Anto sebagai pembeli dan Bapak Joko sebagai penjual. Setelah konsumen memilih sendiri ban bekas yang diinginkan dan sudah terjadi negosiasi harga maka Bapak Anto mengatakan: *“Bapak Anto, saya beli ban bekas ini dengan harga yang sudah kita sepakati dan ban bekas ini apakah tidak ada cacatnya Bapak Joko?”* Maka Bapak Joko sebagai penjual mengatakan: *“Baiklah apabila Bapak Anto setuju dengan harganya dan Bapak Joko mengatakan bahwa tidak ada cacatnya”*. Tetapi setelah melakukan ijab dan qabul, Bapak Anto sebagai pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena ban bekas yang dibeli terdapat cacat.<sup>90</sup>

## 2) Objek dan alat pembayaran jual beli

Objek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal adalah jual beli ban bekas dan alat pembayarannya adalah berupa uang secara tunai. Secara

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Anto selaku pembeli ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 4 mei 2018

sepintas sudah jelas bahwa barang yang dijual yaitu ban bekas yang selalu ditempatkan pada penjual ban bekas tersebut. Berbeda dengan penjual ban baru, yang kadang ban motor dan mobil belum ada, tetapi sudah ada pesanan. Sehingga pada penjualan ban baru terkadang barang yang dipesan berbeda dengan barangnya. Misalnya, mengenai ukuran ban , tetapi pada negosiasinya sudah jelas ada beberapa pilihan, yaitu apabila ukuran yang pertama tidak ada maka sudah disepakati ukuran yang kedua dan seterusnya. Tetapi biasanya ban bekas tidak semuanya orisinil. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena ban bekas yang tidak orisinil bisa dikatakan orisinil dengan mengutak atik sedemikian rupa sehingga terlihat bagus dan orisinil. Dan apabila cacat tersebut tidak terlihat maka pembeli tidak diberitahu oleh penjual. Hal ini sudah menjadi hal yang kebiasaan dalam transaksi jual beli ban bekas di Desa Kabunan dengan menyembunyikan cacat pada ban bekas yang dijual, sehingga pembeli merasa dirugikan ketika mengetahui ban bekas yang dia beli memiliki cacat dan tidak adanya garansi ketika ban bekas yang di beli itu cacat.

Terkait dengan masalah garansi atau pelayanan jika terjadi kerusakan maka pihak penjual tidak lagi melayaninya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Mardi



yang menjelaskan bahwa ban bekas yang telah dibeli dari toko ban bekas sepenuhnya adalah milik pembeli, dan pihak penjual tidak punya hak dan kewenangan lagi terkait ban bekas tersebut, jika terjadi kerusakan atau kecacatan ban bekas tersebut, maka itu adalah tanggung jawab pembeli.<sup>91</sup>

Hasil wawancara dengan berbagai kalangan penjual ban bekas di Desa Kabunan dapat disimpulkan bahwa apabila kita sudah melihat ban bekas dengan teliti, walaupun dengan keterangan yang jelas mengenai ban bekas yang dijual, akan tetapi penjual tidak akan memberitahu ketika ada ban bekas yang mengalami cacat dengan alasan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi kalau misalkan penjual memberitahu kondisi cacatnya kepada pembeli yang ada nanti pembeli tidak akan membelinya dan tidak mendapatkan keuntungan, maka apabila dikemudian hari pembeli menemukan adanya cacat tersebut, menurut penjual itu dianggap sebagai kesalahan dari pembeli yang kurang teliti. Padahal dari penjual sendiri tidak menjelaskan secara terbuka bahwa ban bekas yang dijual ada cacatnya dan penjual tidak memberikan pelayanan garansi ketika ada ban bekas yang mengalami cacat. Jika hal ini terjadi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi transaksi jual beli.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Mardi selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BAN BEKAS DI DESA KABUNAN**

#### **A. Praktek Jual Beli Ban Bekas yang Terjadi di Desa Kabunan.**

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.<sup>92</sup> Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis perdagangan dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli ban bekas yang marak berkembang ditengah-tengah masyarakat Desa Kabunan.

Praktek Jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal, pada prakteknya pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri ban bekas yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Setelah pembeli selesai memilih ban bekas tersebut kemudian pembeli melakukan pembayaran. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi ban bekas tersebut maka penjual

---

<sup>92</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 278.

akan mengatakan pada konsumen ban bekas yang dijual masih dalam kualitasnya baik. Jika ban bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya dengan tujuan penjual akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut Bapak Lutfi selaku pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan ketika mengetahui bahwa kualitas ban bekas tersebut sangat tidak memuaskan dari perkiraan karena adanya cacat. Karena sebelumnya tidak ada kejelasan tentang kualitas dari ban bekas tersebut, karena penjual tidak memberitahu secara langsung cacatnya dan pembeli tidak ada kesempatan untuk mencoba ban bekas yang dibeli pada saat transaksi, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada transparansi barang, yang dimaksud dengan transparansi barang yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Seharusnya ban bekas bisa bermanfaat bagi pembeli, dengan tidak adanya kejelasan terhadap objek ban bekas tersebut maka banyak pembeli merasa dirugikan dan ban bekas tidak bisa dimanfaatkan.

Praktek jual beli ban bekas sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli ban bekas, yaitu kualitas dalam objek jual beli tidak dapat diketahui kualitasnya, kualitas dari ban bekas yang tidak dijelaskan secara jelas oleh penjual, karena hanyalihatkan barang yang akan diperjual, dan kualitas dari ban bekas tersebut tidaklah semua baik, ada banyak ban bekas yang

mengalami kecacatan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian pembeli. Transaksi jual beli tersebut jika diteliti merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual ban bekas. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan. Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan di kedua belah pihak ketika terjadi transaksi. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya dilapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Permasalahan yang menjadi sorotan dari jual beli ban bekas ini adalah tidak adanya kejelasan dalam kualitas ban bekas yang akan dijual, karena kualitas dari ban bekas tidaklah semua baik, banyak ban bekas yang mengalami kecacatan. Dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam kualitas pasti ada pihak yang dirugikan dan begitu juga setelah pembeli membeli ban bekas belum tentu semua akan bagus dan bisa saja ban bekas yang dibeli mengalami kecacatan saat sudah dibeli. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli ban bekas dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah.

Jual beli ban bekas yang terjadi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru sebelum di analisis, maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighth dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.<sup>93</sup>

Analisis praktek jual beli ban bekas jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli yaitu harus ada orang yang melakukan akad (aqidain) dan Syarat orang yang melakukan akad harus baligh dan beragama Islam.<sup>94</sup> Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli ban bekas, mayoritas para pelakunya beragama Islam dan baligh sehingga dapat membedakan yang baik dan buruknya. Pada pelaksanaan jual beli ban bekas ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Rukun jual beli yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli.<sup>95</sup> Mengenai ban bekas yang dijadikan objek jual beli di Desa Kabunan terdapat masalah yaitu ban bekas yang diperjualbelikan mengalami kecacatan dan tidak adanya kejelasan dalam kualitas ban bekas. Dengan demikian pembeli akan merasa dirugikan.

Barang yang menjadi syarat dalam jual beli harus dapat dimanfaatkan, dalam hal ini bahwa ban bekas yang dijual di Desa Kabunan

---

<sup>93</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 167.

<sup>94</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakata: Gema Insani, 2011, hlm. 34

<sup>95</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57.

adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena sebagai alat transportasi kendaraan manusia untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Tetapi ketika ban bekas yang dibeli oleh pembeli itu mengalami kecacatan maka ban bekas tersebut tidak bisa dimanfaatkan dan itu tidak sesuai dengan syarat sah jual beli. Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena ban bekas yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Rukun dalam jual beli mengenai barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syarat yaitu keadaan barang haruslah dapat diserahkan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Desa Kabunan ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahkan. Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi yaitu barang itu harus suci. Pada pelaksanaan jual beli di Desa Kabunan tidak ada masalah karena barang yang dijual itu barang suci bukan najis.

Rukun akad dalam jual beli adalah shighat akad. Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul.<sup>96</sup> Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut shighat akad. Kerelaan kedua

---

<sup>96</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 180

belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut para ulama ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat pada kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah. Dalam shighat akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>97</sup>

Praktek jual beli ban bekas mengandung penipuan karena terletak pada barang yang dijual itu mengandung unsur cacat, dan penjual sendiri tidak menjelaskan secara langsung barang yang mengandung cacat. Selain itu peluang terjadinya penipuan cukup besar, tidak semua pelanggan mengetahui tentang ban bekas yang diperjualbelikan tersebut. Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli ban bekas ini adalah Terbatasnya informasi kondisi dan riwayat dari ban bekas, sehingga menyulitkan pembeli untuk menilai dan mengetahui kondisi ban bekas yang sebenarnya. Oleh karena pihak penjual menyuplai ban bekas dari berbagai sumber, besar kemungkinan mereka juga tidak mengetahui dengan pasti kondisi ban bekas yang dijual dan tidak adanya penjamin atau garansi terhadap ban bekas yang sudah dibeli. Jika suatu saat mengalami kerusakan maka kerusakan ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya Pelaku

---

<sup>97</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 72

usaha kemungkinan melakukan manipulasi dengan memperindah barang untuk menutupi cacat yang terdapat pada ban bekas. Seperti menutupi informasi tentang keadaan ban bekas. Sehingga dapat dipahami bahwa peluang terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli ban bekas di Desa Kabunan tersebut sangatlah besar, karena tidak ada jaminan kejelasan ban bekas dan kurangnya transparansi penjual terhadap kondisi ban bekas.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur *Gharar* didalamnya. Adapun ketidakjelasan dalam kualitas ban bekas yang akan dijual karena kualitas dari ban bekas tidaklah semua baik, banyak ban bekas yang mengalami kecacatan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas di Desa Kabunan**

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.<sup>98</sup>

Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan mu'amalah, seperti larangan memakan harta orang lain serta tidak

---

<sup>98</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57.



sah dan keharusan adanya rela sama rela, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa (4) : 29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. an-Nisa’ : 29).<sup>99</sup>

Ayat diatas dapat dipahami bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan semua bentuk jual beli yang dilarang.

Kita sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang batil dimana salah satu pihak merasa tertekan dan tidak berdaya akan perilaku dari pihak lain dan terpaksa menuruti apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain tersebut. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanya paksaan.

---

<sup>99</sup> Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H, hlm. 83.

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. Membicarakan permasalahan tinjauan atau perpektif mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah perspektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan realita yang terjadi dimasyarakat. Hal inilah yang mungkin yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis proses jual beli ban bekas di Desa Kabunan.

Transaksi dalam jual beli ban bekas di Desa Kabunan dimana pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri ban bekas yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Setelah pembeli selesai memilih ban bekas tersebut kemudian pembeli melakukan pembayaran. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi ban bekas tersebut maka penjual akan mengatakan pada konsumen ban bekas yang dijual masih dalam kualitasnya baik. Jika ban bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya dengan tujuan penjual akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan ketika mengetahui bahwa kualitas ban bekas tersebut sangat tidak memuaskan dari perkiraan karena adanya cacat. Karena sebelumnya tidak ada kejelasan tentang kualitas dari ban bekas tersebut, karena penjual tidak

memberitahu secara langsung cacatnya dan pembeli tidak ada kesempatan untuk mencoba ban bekas yang dibeli pada saat transaksi, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada transparansi barang, yang dimaksud dengan transparansi barang yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka yang biasa disebut garansi. Seharusnya ban bekas bisa bermanfaat bagi pembeli, dengan tidak adanya kejelasan terhadap objek ban bekas tersebut maka banyak pembeli merasa dirugikan dan ban bekas tidak bisa dimanfaatkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermuamalah yang tercantum dalam QS. Asy-Syu'araa (26) : 183.

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>100</sup>

Penjelasan diatas maka jual beli ban bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang karena selain mengandung unsur *Gharar* dapat merugikan konsumen juga. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam kentrangan dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Bagi masyarakat yang melakukan praktek ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikan.

---

<sup>100</sup> Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H, hlm. 98

Hukum Islam membuktikan bahwa sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula yang melanggar larangan-larangan syara'. Sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tentram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara itu harus dihindari. Dengan mengikuti dan menjalankan syariat agama dan memberikan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktek tersebut.

Praktek jual beli ban bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena dengan system dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidakjelasan yaitu dengan tidak mempercayakan adanya kecacatan pada ban bekas.

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.<sup>101</sup> Juhur ulama membagi jual beli di tinjau dari sifatnya menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (*ghair Shahih*). Jual beli *Shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya,

---

<sup>101</sup> Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 750.

sedangkan jual beli *ghair Shahih* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.<sup>102</sup> Mengenai jual beli ban bekas yang terjadi di Desa Kabunan termasuk kedalam jual beli tidak sah (*ghair Shahih*) karena rukun dan syarat objek dalam jual beli ban bekas terdapat kecacatan.

Hukum Islam memberikan ketentuan, bahwa penjualan suatu barang harus sesuai dengan syara', yaitu tidak fasid atau batal. Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, salah satunya adalah jual beli *Gharar* dan jual beli *al-Ghasysyi*. Jual beli *Gharar* adalah jual beli yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek jual beli baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Jual beli *al-Ghasysyi* adalah jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna *al-Ghasysyi* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harga dan merugikan pihak pembeli.<sup>103</sup> jual beli seperti ini menurut jumhur ulama adalah fasid atau batal. Adapun hadis Abi Sa'id yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَا جِرَ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ  
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه ترمذي)

Artinya:”Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-

<sup>102</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm. 91-92.

<sup>103</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.139

sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang *Shahih*)".<sup>104</sup>

Hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shiddiqin*.

Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Jual beli dalam bentuk jual beli *Gharar*, baik *Gharar* dari segi akad maupun *Gharar* dalam objek yang diperjualbelikan juga tidak boleh dilakukan dalam Islam. Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang yang masih mengandung *Gharar*. Para konsumen harus dilindungi agar tidak merasa dizhalimi. Baik dalam hukum Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli apapun yang dapat merugikan konsumen. Terutama dari objek barang yang akan di akadkan. Objek akad harus jelas baik dari segi perolehan maupun dari segi wujudnya harus terhindar dari *Gharar*.

Islam memberikan perlindungan konsumen berupa hak khiyar dan jaminan atas barang (agunan). Hak khiyar merupakan hak yang telah melekat dalam akad mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau diluar dari kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang telah

---

<sup>104</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 556.

dibuat.<sup>105</sup> Sehingga objek benda yang *Gharar* jika terjadi masalah dikemudian hari, maka bisa dibatalkan atau diminta pertanggungjawaban dan dapat diminta ganti rugi atau ditukarkan dengan barang lainnya. baik penukaran dengan uang ataupun penukaran dengan barang yang lain.

Jual beli ban bekas di Desa Kabunan tidak adanya perlindungan konsumen dari objek akad. Karena jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli ban bekas ini berlaku jual beli terputus. Sehingga setelah transaksi pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi atas barang yang dijual. Mereka tidak memberikan garansi dengan alasan karena barang-barang yang mereka jual adalah barang bekas. Kemudian bentuk perlindungan konsumen lainnya adalah dengan memberikan informasi yang jelas tanpa menutupi cacat dari barang. Merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu barang. Jadi sudah seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, dan tidak menutupi cacat dari pada barang.


Penjualan barang tanpa memberikan informasi yang jelas juga merupakan sebuah kecacatan dan kecurangan dalam jual beli. Seperti tindakan penjual ban bekas di Desa Kabunan yang menjual barang bekas yang tidak memberitahukan pada pembeli tentang keadaan dan kondisi barang serta informasi yang berkaitan dengan barang yang akan diperjualbelikan. Penjualan seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut dengan jual beli *al-Ghasysyi* (penipuan) dan mengandung unsur *Gharar* didalam objeknya.

---

<sup>105</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010, hlm. 61

Agama Islam menerangkan segala bentuk transaksi yang curang, baik dalam pembelian atau penjualan sangat dilarang. Dalam Islam sangat mengutamakan asas kejujuran dan kebenaran. Konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan mereka (konsumen) juga harus diberi tahu informasi dengan jujur dan benar bila terdapat kekurangan-kekurangan dalam barang yang diperjual-belikan tersebut.

Pada dasarnya syari'at Islam mampu menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Adapun dasar hukum firman Allah:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al- A'raf:199)"<sup>106</sup>

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, yang dimana umat manusia disuruh mengejakannya. Oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah untuk mengejarkan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>106</sup> Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H, hlm.107



syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dijadikan dasar hukum. Namun para ulama juga sepakat menolak adat secara jelas bertentangan dengan syara'. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus dihilangkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.

Pembahasan ini menurut kaidah qawaid fiqhiyyah disebutkan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”<sup>107</sup>

Penjelasan dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau *kemafsadatan* itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT. Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli.

Para Ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang

---

<sup>107</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2007, hlm. 130.

diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus adanya transparansi suatu barang agar tidak ada pihak yang merasa dibohongi atau dirugikan dikemudian hari.<sup>108</sup>

Pelaku usaha harus memilih dan memilah mana barang-barang yang benar-benar layak untuk dipakai dan dibeli oleh konsumen dan sekaligus menginformasikan kekurangan-kekurangan mengenai barang tanpa menutupi kecacatan dan kekurangannya. Sehingga nantinya tidak merugikan konsumen. Dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai tata cara perdagangan yang baik. Seperti tidak melakukan penipuan pada salah satu pihak dalam jual beli. Para pembeli harus benar-benar menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku dengan bertransaksi dengan jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur penipuan ketika menjelaskan barang itu mengandung cacat.<sup>109</sup> Kesemuanya itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen selaku pihak yang membeli dan menggunakan barang yang dijual.

Hukum Islam sangat melindungi *maslahatul Ammanah* dan kehidupan manusia, agar senantiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang sangat merusak diri sendiri dan

---

<sup>108</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 100.

<sup>109</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 27

merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antar orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi.

Penjelasan diatas dapat kesimpulan bahwa jual beli ban bekas di Desa Kabunan merupakan jual beli *al-Ghasysysi* yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat pada barang. Sehingga praktek jual beli ini merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemudharatan dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan mengandung unsur *Gharar* adanya ketidakjelasan kualitas ban bekas yang diperjualbelikan dan akad yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli ban bekas yang terjadi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal meskipun banyak ban bekas yang diperjualbelikan memiliki kecatatan, namun tidak semuanya demikian. Apabila terdapat ban bekas yang ditemukan cacat, penjual justru menutupi sedemikian rupa, sehingga cacat tidak terlihat. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi ban bekas tersebut maka penjual akan mengatakan pada pembeli ban bekas yang dijual masih dalam kualitasnya baik. Jika ban bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli tidak menemukan cacat, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya, dengan tujuan penjual akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidakjujuran dan tidak adanya kejelasan mengenai ban bekas yang cacat dan tidak adanya garansi ketika ban bekas mengalami cacat oleh pihak penjual ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal.
2. Sistem jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan

ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur *Gharar* adanya ketidakjelasan kualitas ban bekas yang diperjualbelikan, dan jual beli ban bekas ini masuk dalam jual beli *al-Ghasysyi* yaitu jual beli barang yang cacat yang mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaklah para penjual atau pelaku usaha memberikan keamanan dan kenyamanan dengan cara memberikan jaminan kepada pembeli. Agar nanti jika suatu waktu barang yang sudah dibeli mengalami kerusakan, maka barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Sehingga pembeli atau konsumen merasa terlindungi dan tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Dan hendaklah para pembeli atau konsumen lebih berhati-hati dalam memilih barang dan melakukan transaksi jual beli, mengingat barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas, maka pembeli harus lebih waspada atas kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak penjual dengan menawarkan barang yang seakan-akan barang tersebut sangat bagus, padahal di dalamnya mengandung kerusakan yang disembunyikan, sehingga pada akhirnya pembeli sendiri yang merasa kecewa dan harus menanggung risiko.

2. Hendaklah penjual ban bekas menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan mengikuti ketentuan undang-undang tentang perlindungan konsumen karena adanya hak-hak konsumen yang tidak boleh dieksploitasi oleh pelaku usaha. Jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan, maka transaksi tersebut dapat merugikan pihak pembeli sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan dan saling ridha diantara penjual dan pembeli.
3. Bagi penjual ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli ban bekas harus sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat yang ada.
4. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktifitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti memilih ban bekas yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin ya rabbal,alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Jeddah : Darul Hadits Qahirah, 2014.
- Ahmad, Mustad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Aksara, 2013.
- Al Ma'ruf, Moh.Ayatullah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo*. Di akses pada tanggal 28 November 2017.
- AL-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Ali Ismiyanto, Agus Muh. As, *Praktek Jual Beli kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di akses pada tanggal 29 November 2017
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadist*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-Sa'adi dkk, Syech Abdurahman, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.



- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Depok: Gema Insani, 2007.
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fokusmedia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hidayat, Enang, *Fikih Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Kabunan Tahun 2016.

Latifah, Ana Nuryani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, Di akses pada tanggal 28 November 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.

Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul* Penj. Abu Shilah dkk, t.tp: 2007.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

———, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Mustafa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nur Elafi, Hudayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*, Di akses pada tanggal 29 November 2017.

Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010.

Peraturan Desa Kabunan No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Rachmat Syaf'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Darul Fath, Cet. Ke-1, 2004.

———, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

wawancara dengan Bapak Ais selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 4 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Andi selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 4 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Anto selaku pembeli ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 4 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Chamdan selaku Kepala Desa Tegalharjo pada tanggal 1 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Fajar selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Haris selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Joko Suseno selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Kholis selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 4 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Lutfi selaku pembeli ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Mardi selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Mardi selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Nur selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 2 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Safik selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 2 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Solikhin selaku Sekertaris Desa Tegalharjo pada tanggal 1 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Untung selaku penjual ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.

wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ban bekas di Desa Kabunan pada tanggal 3 mei 2018.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN DUKUHWARU**  
**DESA KABUNAN**

Jalan Wijayakusuma No. 59 Telp (0283)6190192 Kode Pos 52451

Kode Desa:33.28.18.005

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 51 /05/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Arief Setiawan

Tempat Tanggal Lahir: Tegal, 23 September 1994

Alamat : Desa Yamansari Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang

NIM : 132311019

Benar-Benar telah melakukan riset di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

***“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAN BEKAS (STUDI KASUS DI DESA KABUNAN KECAMATAN DUKUH WARU KABUPATEN TEGAL)”***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 21 Mei 2018

Kepala Desa Kabunan  
  
**CHAMDAN, S.Pd.I**

## Dokumentasi

1. Dokumentasi bersama Bapak Chamdan,S.Pd.I sebagai Kepala Desa Kabunan



2. Wawancara dengan Bapak Nur sebagai penjual ban bekas



3. Wawancara dengan Bapak Safik sebagai penjual ban bekas





4. Wawancara dengan Bapak Joko Suseno sebagai penjual ban bekas



5. Wawancara dengan Bapak Fajar sebagai penjual ban bekas



6. Wawancara dengan Bapak Untung sebagai penjual ban bekas



7. Wawancara dengan Bapak Hans sebagai penjual ban bekas



8. Wawancara dengan Bapak Ais sebagai penjual ban bekas



9. Wawancara dengan Bapak Mardi sebagai penjual ban bekas





10. Wawancara dengan Bapak Mardi sebagai penjual ban bekas



11. Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai pembeli ban bekas



12. Wawancara dengan Bapak Lutfi sebagai pembeli ban bekas



13. Pembuatan ban bekas vulkanisir oleh Bapak Safik



14. Ban bekas yang diperjualbelikan di Desa Kabunan



15. Ban Bekas yang diperjualbelikan di Desa Kabunan



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **I. Pihak Penjual**

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Dimana alamat bapak?
4. Sudah berapa lama bapak menjadi penjual ban bekas?
5. Apa yang membuat bapak tertarik menjalankan bisnis jual beli ban bekas?
6. Apakah keuntungan menjual ban bekas lebih besar dibandingkan ban baru?
7. Bagaimana pelaksanaan jual beli ban bekas ?
8. Bagaimana cara menetapkan harga ban bekas yang bapak jual dan cara pembayarannya?
9. Apakah bapak mengetahui kualitas ban bekas yang di jual ?
10. Apakah bapak memberitahu jika ban bekas yang dijual itu ada cacatnya?
11. Langkah apa yang bapak lakukan jika ada pembeli yang Mengetahui ban bekas itu cacat?
12. Dari mana cara memperoleh ban bekas?

## II. Pihak Pembeli

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Dimana alamat bapak?
4. Sudah berapa lama bapak menjadi pembeli ban bekas disini?
5. Bagaimana pelaksanaan jual beli ban bekas?
6. Apa yang membuat bapak tertarik membeli ban bekas?
7. Adakah kendala atau kesulitan dalam membeli ban bekas?
8. Apakah bapak pernah dirugikan setelah membeli ban bekas disini?
9. Apakah bapak mengetahui kualitas ban bekas yang di beli?
10. Bagaimana cara penjual menentukan harga dan cara pembayarannya?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap	: Dwi Arief Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 23 September 1994
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Yamansari RT.05 / RW.05 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
No. Telpn	: 0857 8668 8199
Email	: Dwiariefsetiawan94@gmail.com

### **2. PENDIDIKAN**

1. SDN 03 Yamansari Lulus Tahun 2007
2. MTS Negeri Lebaksiu Lulus Tahun 2010
3. MAN 1 Tegal Lulus Tahun 2013
4. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 4 Juli 2018

**Dwi Arief Setiawan**

**NIM: 132311019**

